

Peran Pemerintah Desa Dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan Di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon

The Role of the Village Government in the Sombor Wanua Talumengan Farmer Group In Kakaskasen Three District North Tomohon District, Tomohon City

Imel Melinia Br Sebayang ^{(1)(*)}, Audrey Julia Maria Maweikere ⁽²⁾, Jane Sulinda Tambas ⁽²⁾

1) Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: imelmelinia034@student.unsrat.ac.id

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id

: Jumat, 27 Oktober 2023

Disetujui diterbitkan

: Rabu, 31 Januari 2024

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the role of the village government in the Sombor Wanua Talumengan Farmer Group in Kakaskasen Tiga Subdistrict, North Tomohon District, Tomohon City. This research lasted for 4 months from May to August 2023. The data used in this research was primary data obtained based on interviews with nine informants from the Sombor Wanua Talumengan farmer group, including administrators and members, taken using purposive sampling (randomly) and secondary data obtained from agencies related to the research carried out. Data analysis used is descriptive. The results of this research show that the role of the Village Government in the Sombor Wanua Talumengan Farmer Group in Kakaskasen Tiga Subdistrict, North Tomohon District, Tomohon City has not been fully implemented optimally, this is seen from the aspect of the government as a regulator of rules/mechanisms, and government policies have not been achieved and are not in accordance with the hopes of farmer groups, because they were not able to prepare well. The government as a dynamist, namely (1) Socialization, (2) Mentoring, (3) Training, and (4) Field visits are still lacking because farmer groups have not received socialization and assistance but for training and field visits farmer groups have received it and the government as Facilitators as providers of superior seeds, fertilizer and production facilities have been able to facilitate farmer groups well.

Keywords : role; government; farmers; village

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap sembilan informan kelompok tani Sombor Wanua Talumengan yang sudah termasuk pengurus dan anggota, yang diambil secara *purposive sampling* (secara acak) dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator aturan/mekanisme, dan kebijakan pemerintah tidak tercapai dan tidak sesuai dengan harapan kelompok tani, karena tidak mampu mempersiapkan dengan baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) Kunjungan lapangan masih kurang karena kelompok tani belum ada mendapatkan sosialisasi dan pendampingan tetapi untuk pelatihan dan kunjungan lapangan kelompok tani sudah mendapatkan itu dan pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi kelompok tani sudah baik.

Kata kunci : peran; pemerintah; kelompok tani; desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran pemerintah desa sangat berpengaruh terutama dalam upayanya menciptakan suasana yang mendorong prakarsa pembangunan dan swadaya masyarakat di pedesaan melalui informasi pembangunan, penyaluran partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi. Pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan (Susanti, 2015).

Pemerintah desa secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan hak asal usul, (*rekognisi*), kewenangan lokal berskala desa (*subsidiarity*), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Terutama yang dilihat dari penyelenggaraan pemberdayaan. Peran pemerintah sangat di harapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu memberikan peran penting serta mampu memberi kontribusi yang positif kepada kelompok tani, harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada petani, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan kelompok tani dalam kaitannya dengan bidang pertanian. Sehingga kelompok tani sangat membutuhkan peran pemerintah baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat petani demi pengembangan petani (*regulator*), juga sebagai motor penggerak dalam kelompok tani (*dinamisator*) serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan yang di butuhkan oleh kelompok

tani (*fasilitator*) agar tujuan untuk pengembangan kesejahteraan dapat terwujud (Laboho, 2010).

Kelompok tani merupakan hal yang penting jika menginginkan adanya kemajuan di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar hasil pertanian dan memberikan wadah yang kokoh di pedesaan dan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dalam kelompok tani, tujuan dibentuk kelompok tani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan keluarganya. Kelompok tani sendiri merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyuluhan.

Pembentukan dan pengembangan kelompok tani di setiap desa dan kelurahan menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip, karena kenyataan yang sering terjadi usia kelompok tani tidaklah panjang dan biasanya hanya sebatas usia proyek pembangunan. Kepemimpinan para pengurus kelompok merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kelompok tani yang efektif dan berkelanjutan. Pemimpin atau pengurus kelompok dipandang sebagai agen utama untuk mencapai suatu dinamika kelompok atau menggerakkan anggota-anggota kelompoknya (Wahid, 2008).

Kelurahan Kakaskasen Tiga adalah Salah satu desa yang ada di Kecamatan Tomohon Utara di Kota Tomohon, di Kecamatan Tomohon Utara terdapat 177 kelompok tani salah satu adalah kelompok tani “Sombor Wanua Talumengan”. Kelompok tani ini berdiri sejak tahun 2020 dengan anggotanya sebanyak 13 orang. Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan merupakan salah satu kelompok tani yang membudidayakan tanaman organik holtikultura seperti cabe keriting, cabe rawit, tomat, dan wortel. Adapun masalah yang dihadapi di kelompok tani ini yaitu seperti harga jual hasil panen yang murah, tidak sesuai dengan target sehingga mendapatkan untung yang sedikit.

Menurut pengamatan penulis bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah dalam kelompok tani, faktanya bahwa peran pemerintah desa dalam kelompok tani di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon menuai berbagai masalah. Peran pemerintah sebagai regulator dilihat dari dalam aturan/mekanisme dan kebijakan masih kurang dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kelompok tani sehingga masyarakat petani kurang memahami tentang aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun desa.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisor juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada kelompok tani untuk memberikan berbagai macam pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi kelompok tani, selanjutnya pemerintah masih belum aktif dalam mendampingi kelompok tani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian kepada kelompok tani.

Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah mampu menyediakan kebutuhan kelompok tani dalam hal penyediaan sarana dan prasarana seperti bibit, pupuk dan alat-alat pertanian sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani, namun dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada kelompok tani tidak diindahkan atau kurang dimanfaatkan oleh kelompok tani karena bibit yang diberikan tidak sesuai dengan penanaman kelompok tani.

Berdasarkan kondisi yang terjadi maka berbagai masalah yang menarik untuk mengkaji masalah yang terdapat diatas dan alasan penulis untuk mengambil kelompok tani Sombor Wanua Talumengan, karena kelompok tani ini masih dikatakan petani milenial dan kelompok tani ini dikategorikan masih kelas pemula maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah desa yang aktif dalam kelompok tani di Kelurahan Kakaskasen Tiga, sehingga penulis memilih

judul “Peran Pemerintah Desa dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pemerintah dalam menjalankan perannya pada kelompok tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.
2. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi petani dapat memberikan manfaat dan kontribusi khususnya anggota kelompok tani Sombor Wanua Talumengan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Mei sampai Agustus 2023, mulai dari masa penelitian sampai dengan laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden menggunakan daftar kuisisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Metode Pengumpulan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara sengaja (*purposive sampling*), pengambilan sampel yang digunakan yaitu responden dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan peneliti. Penentuan sampel sebanyak 9 anggota kelompok tani yang aktif sudah termasuk pengurus dan anggota dari 13 yang tergabung dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan.

Konsep Pengukuran Variabel

Adapun yang terjadi konsep pengukuran variabel:

1. Karakteristik Kelompok Tani
 - a. Nama Kelompok Tani
 - b. Tahun Terbentuk
 - c. Penggunaan Lahan
 - d. Jenis Tanaman
2. Karakteristik Responden
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Tingkat Pendidikan
 - d. Pekerjaan

Adapun variabel-variabel untuk mengukur peran pemerintah desa dalam kelompok tani:

1. Regulator

Aturan/mekanisme dan kebijakan pemerintah kepada kelompok tani
2. Dinamisator
 - a. Sosialisasi
 - b. Pendamping
 - c. Pelatihan
 - d. Kunjungan Lapangan
3. Fasilitator
 - a. Penyedia bibit unggul
 - b. Pupuk dan pestisida
 - c. Sarana produksi

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Tomohon terletak di 23 km Selatan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berada pada ketinggian 750-800 M diatas permukaan laut dan memiliki topografi perbukitan datar. Kota Tomohon berada pada 01° 15' Lintang Utara dan 124°50' Bujur Timur. Kota Tomohon terdiri atas 5 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah kecamatan Tomohon Utara (42,28 km²) dan kecamatan Tomohon Tengah sebagai kecamatan terkecil (9,41 km²). Luas wilayah Kota Tomohon berdasarkan UU No.10 Tahun 2013 sekitar 147,21 km² dengan jumlah penduduk mencapai 95.157 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Kota Tomohon yakni:

Sebelah Utara : Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa

Sebelah Timur : Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa

Sebelah Selatan : Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa

Sebelah Barat : Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa

Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Kakaskasen Tiga berjumlah 2.501 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 781 KK.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kakaskasen Tiga

No.	Uraian Penduduk	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	1263	50.45
2.	Perempuan	1238	49.51
Jumlah		12.214	100

Sumber: Diperoleh dari Kantor Kelurahan Kakaskasen Tiga, 2023

Tabel 1 diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga Bawah secara keseluruhan adalah 2.501 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.263 jiwa dengan persentase 50.49%, jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.238 jiwa dengan persentase 49.51% yang tersebar dalam tujuh lingkungan.

Deskripsi Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan

Sombor Wanua Talumengan merupakan bahasa daerah lebih khususnya bahasa

Tombulu. Sombor memiliki arti “muda”, Wanua yaitu tempat tinggal dan Talumengan nama kampung, jadi kalau digabungkan anak muda yang tinggal di kampung Talumengan karena rata-rata anggota kelompok tani Sombor Wanua Talumengan tergolong masih muda atau pemuda. Terbentuknya kelompok tani ini karena nama anggota berdomisili dalam satu kampung dan masih muda sehingga dinamakan kelompok tani Sombor Wanua Talumengan dengan jumlah 13 anggota kelompok.

Karakteristik Responden Menurut Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara berfikir seseorang, kemampuan dalam bekerja atau melakukan aktivitas. Petani yang lebih muda memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dari pada petani yang berumur lebih tua.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	21-30	3	33,33
2.	31-40	6	66,67
Jumlah		9	100

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Tabel 2 menunjukkan umur petani responden pada interval 21-30 tahun nilai persentasenya 33.33% dengan 3 responden dan pada interval 31-40 tahun nilai persentasenya 66.67% merupakan persentase yang terbanyak 6 responden.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Apabila seseorang sudah menemukan pekerjaan yang tepat atau sesuai dengan keinginannya maka orang itu fokus dengan pekerjaannya demi memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden menurut tingkat pekerjaan pada kelompok tani Sombor Wanua Talumengan semua berasal dari petani dengan jumlah 9 responden dengan nilai persentasenya (100%).

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi petani untuk meningkatkan kualitas dalam cara berpikir maupun dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3 menjelaskan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah (Petani)	Persentase (%)
1.	SD	2	22
2.	SMP	1	11
3.	SMA	2	22
4.	SMK	4	45
Jumlah		9	100

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Tabel 3 menunjukkan karakteristik responden menurut tingkat Pendidikan SMP sebanyak 1 responden dengan persentase (11%), SD dan SMA sebanyak responden dengan persentase (22%) dan SMK sebanyak 4 responden dengan persentase (45%).

Peran Pemerintah Desa Dalam Kelompok Tani Sombor Wanua Talumengan

Peran pemerintah desa dalam kelompok tani Sombor Wanua Talumengan di Kakaskasen Tiga yaitu berperan dalam hal membantu perlengkapan berkas, membantu prasarana dan sarana yaitu seperti alat pertanian, bibit dan pupuk. Disini juga kelompok tani dan harapan agar pemerintah desa juga terlibat di setiap kelompok tani seperti mendorong kelompok tani agar lebih maju, dan bisa menghadapi masalah kelompok tani.

Sebagai bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlu adanya peranan yang aktif kepada kelompok tani untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran secara aktif kepada kelompok tani sehingga peneliti memilih peran pemerintah menurut Laboho (2010) yaitu:

Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Kelompok Tani

Indikator peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu peran pemerintah sebagai pelaksana dan pergerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan pengaturan rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan

efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan.

Aturan / Mekanisme dan Kebijakan Pemerintah Kepada Kelompok Tani merupakan sebuah patokan yang didirikan oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bagaimana aturan/mekanisme dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dalam kelompok tani?

Hasil penelitian pada indikator peran pemerintah desa sebagai regulator dalam kelompok tani memperoleh jawaban:

1. M.R, menjelaskan bahwa *“Pemerintah desa belum ada memberikan peraturan, jadi saya selaku sekretaris kelompok tani belum paham dengan aturan yang ada”*.
2. M.M, menjelaskan bahwa *“Aturan dan mekanisme dalam kelompok tani saya tidak tahu, karena kami anggota kelompok tani tidak pernah dijelaskan oleh pemerintah desa dan tidak pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal tentang peraturan”*.
3. R.L, menjelaskan bahwa *“Kalau untuk aturan mekanisme dalam kelompok tani atau semacamnya tentunya kami semua anggota kelompok tani Sombor Wanua Talumengan tidak ada tau tentang aturan yang mengatur masalah petani apalagi pemerintah tidak pernah menjelaskan kepada kami”*.
4. A. K, menjelaskan bahwa *“Aturan dari pemerintah desa saya juga tidak terlalu tau soal itu tapi sampai saat ini pemerintah belum pernah menjelaskan aturan yang ada untuk kelompok tani, tapi kalau dari Dinas pertanian ada seperti pembentukan Kelompok Tani: Aturan mengenai prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok tani, termasuk jumlah anggota minimal, kegiatan yang dilakukan, dan dokumen yang diperlukan”*.
5. F.R, menjelaskan bahwa *“Untuk aturan dari pemerintah desa tidak ada tetapi kalau*

dari dinas pertanian atau pusat itu ada memberikan aturan seperti pembuatan berita acara dan bukti cap kelompok, nama-nama anggota dan tidak boleh masuk dalam dua kelompok”.

6. R.R, menjelaskan bahwa *“Saya selaku anggota kelompok tani yang tidak tahu tentang aturan ataupun kebijakan pemerintah, karena sejauh ini belum ada aturan dari pemerintah untuk kelompok tani”*.
7. N.Y, menjelaskan bahwa *“Tentang aturan dari pemerintah desa belum ada dan saya secara pribadi tidak tahu apa saja aturan dari pemerintah desa”*.
8. J.J, menjelaskan bahwa *“Kalau peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah desa sampai saat ini belum pernah dibahas oleh pemerintah desa sehingga kami kelompok tani minim pengetahuan tentang hal itu”*.
9. F.V, menjelaskan bahwa *“Yang memberi aturan kepada kelompok tani itu langsung dari pusat dinas pertanian seperti jenis kegiatan pertanian yang mengatur jenis kegiatan pertanian yang diizinkan atau direkomendasikan oleh kelompok tani, seperti jenis tanamannya kalau langsung dari pemerintah itu tidak ada aturan karna sampai saat ini pemerintah belum pernah menjelaskan aturan itu”*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peran pemerintah desa di Kelurahan Kakaskasen Tiga dalam indikator regulator memang tidak ada peraturan atau kebijakan khusus untuk kelompok tani. Petani pun kurang mengetahui masalah peraturan kebijakan atau karena memang menurut anggota tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga tidak pernah mengadakan pertemuan yang membahas tentang aturan/mekanisme dan kebijakan dalam kelompok tani. Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada kelompok tani tentang aturan dasar sehingga kelompok tani kurang pengetahuan mengenai aturan-aturan serta mekanisme yang mengatur masalah dalam kelompok tani tersebut.

Tetapi dari pemerintah pusat melalui dinas pertanian ada aturan yang sudah

ditetapkan berdasarkan peraturan umum yang diturunkan dari pusat atau dinas pertanian, contohnya:

- a. Pembentukan kelompok tani: Aturan mengenai prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok tani, termasuk jumlah anggota minimal, kegiatan yang dilakukan, dan dokumen yang diperlukan.
- b. Jenis kegiatan pertanian: Aturan yang mengatur jenis kegiatan pertanian yang diizinkan atau direkomendasikan oleh kelompok tani, seperti jenis tanaman, hewan ternak, atau teknik budidaya tertentu.
- c. Pembuatan berita acara
- d. Bukti cap kelompok

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam Kelompok Tani

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan pemerintah yang memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, arahan serta dorongan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan, arahan yang efektif secara menyeluruh tanpa melihat adanya perbedaan antara satu sama lain maka dari situ sangat dibutuhkan masukan dari pemerintah untuk masyarakat khususnya para petani melalui lembaga pemerintah maupun penyuluh yang bertugas di tempat tersebut dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Pemerintah dapat dilihat dari aspek sosialisasi, pendampingan, kunjungan lapangan, dan pelatihan.

1. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi pemerintah desa mengenai masalah yang dihadapi kelompok tani dapat dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan berfokus pada berbagi informasi, memecahkan masalah, dan membangun pemahaman bersama. Adapun sosialisasi itu seperti:

a. Penentuan Tujuan

Pemerintah desa harus menetapkan tujuan yang jelas dari sosialisasi, misalnya meningkatkan produktivitas pertanian, memecahkan masalah tertentu, atau memperkenalkan program baru.

b. Identifikasi Masalah Utama

Pemerintah desa harus memahami dengan jelas masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok tani, baik melalui survei, wawancara, atau studi kasus. Seperti apa pelaksanaan sosialisasi mengenai masalah yang dihadapi kelompok tani?

Hasil penelitian pada indikator peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kelompok tani memperoleh jawaban:

- M.R, menjelaskan bahwa *“Untuk sosialisasi pemerintah desa belum ada melakukan sosialisasi kepada kelompok tani jadi sampai saat ini jika ada masalah di dalam kelompok tani masih ditangani sendiri”*.
- M.M, menjelaskan bahwa *“Untuk masalah-masalah yang dihadapi biasanya kami sendiri yang menghadapi dan jika pun pemerintah datang hanya untuk mengambil sampel dan buat sosialisasi yang di lakukan pemerintah desa untuk berkunjung ke kelompok tani untuk saat ini belum ada”*.
- R.L, menjelaskan bahwa *“Adapun masalah yang kami hadapi biasanya kami para anggota yang menangani dan mencari solusi sendiri, pemerintah desa datang hanya untuk mengambil foto dan biasanya yang melakukan sosialisasi yaitu anggota PPL”*
- A.K, menjelaskan bahwa *“Kalau untuk permasalahan yang di hadapi oleh kelompok tani itu langsung ditangani oleh penyuluh karena dari pihak pemerintah desa hanyalah memfasilitasi seperti adanya keluhan dari kelompok tani”*.
- F.R, menjelaskan bahwa *“Sampai saat ini pemerintah desa belum pernah melaksanakan sosialisasi kepada kelompok tani”*.
- R.R, menjelaskan bahwa *“Kalau untuk sosialisasi dari pemerintah desa belum pernah melakukan sosialisasi Adapun sosialisasi itu yaitu langsung dari dinas pertanian seperti mengumpulkan seluruh anggota kelompok tani”*.
- N.Y, menjelaskan bahwa *“Saya sebagai anggota kelompok tani belum pernah melihat pemerintah desa melaksanakan sosialisasi ke kelompok tani adapun*

sosialisasi tersebut itu langsung dari dinas pertanian, tetapi sosialisasi tersebut tidak menentu dan tidak merata ke semua kelompok tani”.

- J.J, menjelaskan bahwa *“Saya pribadi tidak tahu jelas bagaimana sosialisasi pemerintah desa kepada kelompok tani karena sampai saat ini pemerintah belum pernah melaksanakan sosialisasi tersebut”.*
- F.V, menjelaskan bahwa *“Untuk sosialisasi dari pemerintah desa belum ada melaksanakan sosialisasi adapun sosialisasi yaitu langsung dari dinas pertanian ada mengadakan perkumpulan dan pertemuan”.*

Dari hasil wawancara menurut anggota kelompok tani pemerintah desa belum ada melaksanakan sosialisasi kepada kelompok tani. Adapun sosialisasi itu langsung dari dinas pertanian seperti mengadakan perkumpulan ataupun pertemuan. Peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam aspek sosialisasi bisa dikatakan belum maksimal, karena memang pemerintah belum melakukan sosialisasi yang diberikan kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Karna dari hasil observasi dan data yang peneliti dapat hanya ada sosialisasi yang diadakan oleh dari dinas pertanian yang dilaksanakan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, menurut salah anggota kelompok tani sosialisasi yang dilaksanakan pun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani yang ada di Desa Toapaya. Untuk sosialisasi itu sendiri tidak semua anggota kelompok tani mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut karena peserta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terbatas, juga karena peserta yang mengikuti sosialisasi hanya kelompok yang mendapat panggilan dari pihak penyelenggara baik dari pihak kabaupaten maupun desa.

2. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli dibidang petani, mengarahkan dan mampu memberi motivasi kepada masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi yang ada.

Pendampingan yaitu untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, melakukan pembinaan, mendorong dan membimbing kelompok tani, serta mendampingi dan mengawasi bantuan yang diterima oleh petani. Menurut Suharto (2006) menyatakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu pendampingan ini sangat diperlukan dalam proses kelompok tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga. Bagaimana cara pendampingan yang dilakukan pemerintah desa dalam kelompok tani?

Hasil penelitian pada indikator peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kelompok tani memperoleh jawaban:

- a. M.R, menjelaskan bahwa *“Pendampingan dari pemerintah desa juga belum ada dan masih sampai saat ini kami sendiri yang memikirkan ide sendiri untuk melakukan penanaman”.*
- b. M.M, menjelaskan bahwa *“Sejauh ini belum ada pendamping dari pemerintah desa jadi kami belum ada mendapatkan pendampingan”.*
- c. R.L, menjelaskan bahwa *“Selama saya bergabung ke kelompok tani ini belum pernah melihat pemerintah desa melakukan pendampingan”.*
- d. A.K, menjelaskan bahwa *“Untuk pendamping dari pemerintah desa sampe saat ini belum pernah ada pendamping tersebut”.*
- e. F.R, menjelaskan bahwa *“Pendampingan dari pemerintah belum ada jadi kami tidak ada mendapatkan pendamping seharusnya dari pihak pemerintah ada untuk mengarahkan atau memberikan perhatian kepada kami kelompok tani”.*
- f. R.R, menjelaskan bahwa *“Belum ada pendamping dari pemerintah adapun ide ide yaitu dari kami sendiri jadi belum ada mendapatkan arahan dari pemerintah”.*
- g. N.Y, menjelaskan bahwa *“Untuk pelaksanaan pendamping saya tidak pernah melihat pemerintah desa untuk melakukan pendampingan”.*

- h. J.J, menjelaskan bahwa “*Sejauh ini pemerintah belum ada melakukan pendampingan kepada kami kelompok tani jadi saya juga secara pribadi belum pernah melihat pemerintah desa melakukan pendampingan*”.
- i. F.V, menjelaskan bahwa “*Untuk pendamping biasanya di lakukan oleh PPL itu pun sangat jarang tetapi kalau dari pemerintah desa belum pernah sama sekali*”.

Pendamping lapangan adalah petugas pemerintah desa atau ahli pertanian dapat melakukan kunjungan lapangan ke lahan pertanian anggota kelompok tani yang dapat memberikan saran langsung tentang perawatan tanaman, pengelolaan air, dan praktik pertanian lainnya tetapi dari hasil wawancara menurut informan diatas bahwa belum pernah ada pendampingan dari pemerintah desa sehingga kelompok tani kurang paham tentang pendampingan dan para anggota kelompok tani mengeluh dengan hal itu.

3. Pelatihan

Pelatihan ialah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok Tani. Bagaimana model pelatihan yang diberikan pemerintah desa kepada kelompok tani?

Hasil penelitian pada indikator peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kelompok tani memperoleh jawaban:

- a. M.R, menjelaskan bahwa “*Kalau pelatihan tetap ada dan ini kebanyakan dari pusat dan pelatihan yang diberikan itu seperti sekolah lapangan cara bertanam dan pelatihan ini dilakukan dalam sebulan*”.
- b. M.M, menjelaskan bahwa “*Kalau untuk pelatihan dari pemerintah desa ada meskipun yang kami dapatkan sering dari pemerintah provinsi tetapi dari pemerintah juga pernah melakukan pelatihan*”.
- c. R.L, menjelaskan bahwa “*Model untuk pelatihan yang diberikan pemerintah itu seperti organik sekolah lapang ada cara-cara menggunakan alat pertanian*”.
- d. A.K, menjelaskan bahwa “*Untuk model pelatihan yang diberikan dari pemerintah*

yaitu kebanyakan kami melakukan itu seperti sekolah lapang ataupun cara-cara bertanam”.

- e. F.R, menjelaskan bahwa “*Model yang diberikan pemerintah desa berupa cara pemakaian alat pertanian tetapi keseringan kamu melakukan sekolah lapang*”.
- f. R.R, menjelaskan bahwa “*Untuk model pelatihan yang diberikan pemerintah itu seperti cara bertanam ada juga sekolah lapang dan klinik organik*”.
- g. N.Y, menjelaskan bahwa “*Yang saya tau pemerintah memberikan model pelatihan seperti sekolah lapang*”.
- h. J.J, menjelaskan bahwa “*Segi pelatihan yang diberikan pemerintah desa untuk mengembangkan dan memajukan kondisi petani*”.
- i. F.V, menjelaskan bahwa, “*Model pelatihan yang diberikan pemerintah itu seperti cara penanamannya dan pemupukannya*”.

Hasil wawancara diatas dengan informan yang bersangkutan dengan aspek pelatihan bahwa pemerintah ataupun penyuluh sudah aktif dalam memberikan pelatihan kepada kelompok tani. Sehingga kelompok tani bagus untuk mengembangkan potensi memberikan keterampilan, pengetahuan, dan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan ekonomi.

4. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terjadwal ke suatu lokasi dengan secara langsung meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan serta melakukan pengawasan kepada anggota kelompok tani, mengawasi segala bentuk aktivitas dari kelompok tani yang ada. Di Kelurahan Kakaskasen Tiga sendiri hanya memiliki satu petugas penyuluh yang di tugaskan untuk menjadi pendamping kelompok tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, kurangnya anggota penyuluh tetapi kunjungan lapangan masih rutin dilaksanakan di setiap bulan dan merata ke setiap lahan pertanian yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga. Apakah petugas PPL rutin melakukan kunjungan lapangan setiap bulannya?

Hasil penelitian pada indikator peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kelompok tani memperoleh jawaban:

- a. M.R, menjelaskan bahwa *“Iyaa kunjungan lapangan sudah bagus dan rutin di lakukan kepada kami kelompok tani dan untuk jumlah yang berkunjung itu hanya satu karena di kelurahan Kakaskasen tiga ini setiap kelompok ada satu petugas yang turun ke lapangan”*.
- b. M.M, menjelaskan bahwa *“PPL selalu rutin untuk kunjungan lapangan kepada kami kelompok tani”*.
- c. R.L, menjelaskan bahwa *“Untuk kunjungan lapangan PPL selalu rutin setiap bulan itu selalu ada dan selalu menanyakan keadaan yang ada”*.
- d. A.L, menjelaskan bahwa *“Untuk kunjungan lapangan PPL selalu rutin dan selalu juga menanyakan perkembangan di kelompok kami unntuk jumlah petugas PPL ada 1 orang dari penyuluh”*.
- e. F.R, menjelaskan bahwa *“Kalau kunjungan lapangan itu tetap ada dan selalu di adakan setiap bulannya minimal sekali dalam sebulan”*.
- f. R.R, menjelaskan bahwa *“Iyaa kunjungan lapangan sudah bagus dan rutin di lakukan kepada kami kelompok tani dan untuk jumlah yang berkunjung itu hanya satu karena di Kelurahan Kakaskasen tiga ini setiap kelompok ada satu petugas yang turun ke lapangan”*.
- g. N.Y, menjelaskan bahwa *“Iya untuk kunjungan lapangan setiap bulannya selalu di laksanakan dan sudah bagus untuk kami”*.
- h. J.J, menjelaskan bahwa *“Kunjungan lapangan sudah bagus di kelompok kami setiap bulannya selalu ada petugas ke kelompok kami dan menanyakan keadaan atau perkembangan penanaman kami”*.
- i. F.V. menjelaskan bahwa *“Kalau untuk kunjungan lapangan sudah bagus dan aktif dalam kelompok tani ini”*.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai dinamisator yang didalamnya terdapat sub indikator sosialisasi,

pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan. Menunjukkan dari keempat sub indikator yang disebutkan masih mengarah ke arah netral atau kurang berperan, pada sub indikator sosialisasi masih belum maksimal, karena kurangnya perhatian pemerintah kepada kelompok tani. Begitu juga dengan sub indikator pendampingan, untuk pendampingan sendiri dari pemerintah desa tidak ada yang hanya mengharapkan pendampingan oleh pihak provinsi. Sehingga disimpulkan bahwa dari segi kunjungan lapangan petugas PPL sudah melaksanakan tugas untuk turun langsung ke lapangan, tetapi kurangnya anggota PPL membuat penyuluh tidak melakukan kunjungan secara merata mengingat petugas PPL hanya ditunjuk satu orang setiap kelurahan.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Kelompok Tani

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan atau berperan menguntungkan masyarakat dan sebaliknya dalam hal mengoptimalkan kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah harus menjadi aktor yang mampu menciptakan dan menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan petani dalam kondisi aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya manusia. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian bantuan Modal, Pupuk, Benih dan alat penunjang pertanian. Apakah ada bantuan yang di berikan kepada kelompok tani? Jika ada apa apa sajakah itu?

Hasil penelitian pada indikator peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam kelompok tani memperoleh jawaban:

1. M.R, menjelaskan bahwa *“Iya ada, bantuan dari pemerintah itu berupa pupuk, bibit, alat-alat pertanian jadi tetapi bantuan yang dari pemerintah itu tidak menentu kapan akan di berikan bantuan tersebut”*.
2. M.M, menjelaskan bahwa *“Kalau berupa bantuan itu ada bantuannya seperti bibit,*

alat-alat pertanian pupuk tapi tidak pernah menggunakan bibit tersebut karena bibit yang diberikan tidak sesuai dengan tanaman yang kami tanam”.

3. R.L, menjelaskan bahwa *“Saya sebagai anggota kelompok tani itu memang sudah pernah mendapatkan bantuan pupuk, bibit, alat-alat semprot dan alat pertanian lainnya jadi bantuan di bagi ke semua anggota kelompok tani tapi anggota disini yang mengambil bantuan diberikan karena tidak di pakai dalam kelompok ini seperti bantuan bibit”.*
4. A.K, menjelaskan bahwa *“Saya biasanya menerima bantuan pupuk dan bibit ada juga alat pertanian tapi pupuk yang di berikan kami jarang menggunakan dan untuk bibit tidak pernah kami gunakan karena bibit yang di berikan tidak sesuai dengan apa yang kami tanam”.*
5. F.R, menjelaskan bahwa *“Untuk bantuan kami ada dapat seperti bibit dan pupuk tetapi itu tidak menentu dan itupun kami para anggota jarang menggunakan pemberian bantuan karena tidak sesuai dengan tanaman yang kami tanam”.*
6. R.R, menjelaskan bahwa *“Ada kami sudah beberapa kali mendapatkan bantuan ada seperti pupuk, bibit, dan alat-alat pertanian lainnya dan untuk pemberian bantuan itu terkadang kami tidak menggunakannya ke kelompok tani karena tidak sesuai dengan tanaman yang kami tanam”.*
7. R.R, menjelaskan bahwa *“Kalau untuk bantuan itu tetap ada dan sudah berapa kali mendapatkan bantuan tersebut, untuk bantuannya itu seperti bibit dan ada juga diberikan pupuk”.*
8. J.J, menjelaskan bahwa *“Kalau berupa bantuan itu ada bantuannya seperti bibit, alat-alat pertanian pupuk tapi tidak pernah menggunakan bibit karena bibit yang diberikan tidak sesuai dengan yang kami tanam”.*
9. F.V, menjelaskan bahwa *“Iya ada, bantuan dari pemerintah itu berupa pupuk, bibit, alat-alat pertanian jadi tetapi bantuan yang dari pemerintah itu tidak menentu kapan diberikan”.*

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator jika dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah desa telah mampu memberikan bantuan kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga dalam memberi bantuan seperti bibit, pupuk dan alat pertanian lainnya, dan benar telah diterima oleh kelompok tani sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, hanya saja bibit yang diberikan oleh dinas pertanian tidak terpakai oleh kelompok tani karena bibit tidak sesuai dengan penanaman kelompok tani Sombor Wanua Talumengan. Bibit yang diberikan kepada kelompok tani seperti bibit jagung, bibit padi sedangkan tanaman yang di tanam oleh kelompok tani adalah sayur-sayuran seperti pakcoy, tomat dan cabe.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran pemerintah desa pada aspek regulator khususnya mengenai aturan / mekanisme serta kebijakan pemerintah dalam kelompok tani di kategorikan tidak berperan karena dari pemerintah desa tidak ada memberikan aturan kepada kelompok tani, bahwa yang memberikan aturan-aturan kepada kelompok tani yaitu langsung dari dinas pertanian ataupun penyuluh pertanian. Peran pemerintah desa pada aspek dinamisator yang di dalamnya terdapat subindikator sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan. Menunjukkan bahwa dari keempat sub indikator yang disebutkan masih mengarah ke arah netral atau kurang berperan, karena 4 dari subindikator ini 50% berperan dan 50% tidak berperan. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, pemerintah desa telah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat tani yang ada di Kelurahan Kakaskasen Tiga dalam memberi bantuan seperti benih sayuran, pupuk dan alat pertanian lainnya, dan benar telah diterima oleh kelompok tani sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Jadi dalam indikator ini peran pemerintah desa termasuk kategori sudah berperan.

Saran

1. Seharusnya pemerintah sebagai regulator mampu menjadi penyedia yang memberikan arah yang baik bagi masyarakat petani melalui regulasi yang memihak kepada kelompok tani untuk mengembangkan dan memajukan kelompok tani.
2. Pemerintah sebagai dinamisator harus lebih rutin bersosialisasi dan memberikan pendampingan kepada kelompok tani agar mengembangkan potensi para petani dan meningkatkan kualitas produksi para petani.
3. Seharusnya pelaksana penyuluh pertanian lapangan harus ditambah setiap Kelurahan dikarenakan begitu banyak jumlah kelompok tani yang ingin diberdayakan namun tidak sesuai dengan jumlah petugas.
4. Seharusnya pemerintah menanyakan kepada kelompok tani tentang apa yang ditanam agar bibit yang diberikan tidak sia-sia dan bisa di pergunakan oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Laboho, M. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, S. 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 3(3):898-912.
- Wahid, A. 2008. Dinamika Kelompok Tani pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Das Walanae Desa Lasiwala. *Jurnal Kehutanan dan Masyarakat Sidrad*. 3(2):149-157.